

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024



DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang atas izin-Nyalah Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 telah selesai disusun.

Sesuai dengan fungsinya, maka rencana kerja, program, dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Perubahan 2024 harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara ini berisi tentang Prioritas Program dan Indikasi Kegiatan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Indikasi pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan.

Penajam, 08 Juli 2024

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. PPU



Waluyo, S.Sos
Pembina Tk. I/ IV.b
Nip. 19681204 198901 1 001

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistimatika Penulisan	4
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II	5
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	20
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	22
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	24
BAB V	PENUTUP	33

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja. Penyusunan Renja perangkat daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja perangkat daerah yang definitif. Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Undang - undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah 1 (satu) tahun ke depan. Renja Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut sebagai RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas dan indikasi kegiatan khusus dijadikan pedoman penyusunan kebijakan umum APBD. Proses penyusunan renja dimulai dengan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi. Selanjutnya, menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan

strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Keterkaitan antara Renstra dan Renja adalah Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program kerja. Sedangkan Renja menafsirkan Renstra dan menentukan rencana kerja agar sasaran dan target dapat tercapai.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007

Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Utara Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 03 Tahun 2016, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 27 tahun 2017 tentang susunan organisasi, tata kerja, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026.
18. Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
19. Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tahun 2024 ini disusun untuk menetapkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang masing – masing yang diemban oleh seluruh Aparatur Sipil Negara dan dilaksanakan secara

koordinatif, terpadu agar terwujud keberhasilan pembangunan dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Tujuan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 yang diharapkan adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil;
 - b. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - c. Tersedianya data dan informasi kependudukan dan catatan sipil yang akurat dan mutakhir (real time)

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 disusun dengan Sistematika

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TW. II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TW II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Triwulan II

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 perlu dilakukan evaluasi per triwulan. Adapun evaluasi terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 meliputi :

- 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
- 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
- 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
- 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Capaian pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Capaian Pelaksanaan Program
Kegiatan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
Triwulan II Tahun Anggaran 2024

N0.	Nama Program	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Penjelasan
1	2	3	4	6	7	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.688.067.634	3.589.749.387	4.098.318.247	46.69	

	DAERAH KABUPATEN/KOTA					
A	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.628.477.742	2.195.701.024	2.432.776.718	47.44	Capaian Sedang Alasan: Gaji dan TPP masih dibayarkan sebanyak 6 bulan, Gaji 13, Gaji 14 terealisasi
2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	108.600.000	25.230.000	83.370.000	23.23	Capaian Rendah Alasan: Terealiasasinya Honor PA, PPTK, PPK, Bendahara, Bendahara Pembantu, Bendahara, Barang dan Pejabat Pengadaan masih 3 bulan, Juli baru terealisasi hingga bulan juni.
B	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
3	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.887.000	-	1.887.000	0	Capaian Sangat Rendah Optimalisasi realisasi kinerja dan keuangan triwulan 4
4	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	357.161.326	93.995.000	263.166.326	26.32	Capaian Sangat Rendah Alasan: Belanja Modal Sebagian besar baru akan terealisasi di RAK Semester 2.
5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.100.000	3.596.400	7.503.600	32.40	Capaian Rendah Alasan: Belum terealiasasinya semua belanja cetak dan penggandaan,
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	605.541.813	333.447.325	272.094.488	55.07	Capaian Sedang Alasan: Belum terealiasasinya semua perjalanan dinas, belanja bahan bakar dan pelumas serta koordinasi dan konsultasi masih dalam proses pelaksanaan
C	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
6	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	224.372.822	196.002.158	28.370.664	87.36	Capaian Tinggi Alasan : terealiasasinya sebagian besar penyediaan jasa surat menyurat, pembelian materai, dan belanja ATK.
7	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.495.316	12.422.780	17.072.536	42.12	Capaian Sedang Alasan: Terealisasi internet masih selama 6 bulan

8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.489.399.615	712.294.000	777.105.615	47.82	Capaian Sedang Alasan: terealisasi gaji THL masih selama 5 bulan dan terelisasinya THR THL
D	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.312.000	17.060.700	140.251.300	10.85	Capaian Sangat Rendah Alasan: Baru terealisasi beberapa STNK Kendaraan Dinas. Untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin tidak terealisasi banyak disebabkan tidak banyaknya kendaraan dinas yang memerlukan perawatan kendaraan dinas
10	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.720.0000	-	24.720.000	0	Capaian Sangat Rendah Alasan : Belum adanya pemeliharaan Notebook, Komputer, dan Printer kantor
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	407.319.178	343.804.500	63.514.678	84.41	
A	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk					
1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	339.719.178	276.204.500	63.514.678	81.30	Capaian Sangat Tinggi Alasan : Terealisasinya belanja Ribbon Fargo
B	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk					
1	Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP- El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	67.600.000	67.600.0000	0	100	Capaian Sangat Tinggi Alasan : Terealisasinya seluruh pengadaan belanja Blangko KIA
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	142.185.000	20.087.415	122.097.585	14.13	
A	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil					

1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	142.185.000	20.087.415	122.097.585	14.13	Capaian Sangat Rendah Alasan : Belum terealisasinya pengadaan Formulir Pelayanan Administrasi Kependudukan, masih dalam proses.
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	720.849.480	74.760.045	646.089.435	10.37	
A	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan					
1	Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	322.182.730	-	322.182.730	0	Capaian Sangat Rendah Alasan : Belum terealisasinya pengadaan Alat Perekaman KTP yang akan dilaksanakan sesuai RAK di semester 2 dan pengadaan alat cetak ktp yang baru dapat dilakukan diperubahan karena terjadi kesalahan kode rekening.
B	Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
1	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	301.306.750	59.509.800	241.796.950	19.75	Capaian Sangat Rendah Alasan : pelaksanaan pelayanan keliling masih dalam proses pelayanan.
C	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan	25.000.000	-	25.000.000	0	Capaian Sangat Rendah Optimalisasi realisasi kinerja dan keuangan triwulan 3

	Pemanfaatan Data Kependudukan					
2	Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25.000.000	-	25.000.000	0	Capaian Sangat Rendah Alasan : Kegiatan sosialisasi baru akan dilaksanakan di bulan Juli semester 2
D	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
1	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	47.360.000	15.250.245	32.109.755	32.20	Capaian Rendah Alasan : Belum terlaksananya beberapa bimtek karena masih menunggu undangan dari provinsi maupun pusat.
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	40.061.000	17.114.400	22.946.600	42.72	
A	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan					
1	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	40.061.000	17.114.400	22.946.600	42.72	Capaian Sedang
		8.998.482.292	4.045.515.747	4.952.966.545	44.96	

Tabel
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara
Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten pada Tahun 2024-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
								I		II				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		36	Bulan	19.749.749.991	12	Bulan	8.998.482.292	3	2.064.379.159	3	1.981.136.588	49,69	34,13	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	%	17.541.000.000	87,00	%	7.688.067.634	14	2.012.469.042	21	1.577.280.345	40,23	47,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	%	180.000.000	87,00	%	50.000.000	-	-	-	-	-	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	Dokumen	180.000.000	7,00	Dokumen	50.000.000	-	-	-	-	-	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	%	11.977.266.402	87	%	4.737.077.742	25	1.305.172.274	13	915.758.750	43,68	46,88	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336	Orang/Bulan	11.651.466.402	336	Orang/Bulan	4.628.477.742	84	1.279.942.274	84	915.758.750	50,00	47,44	DUKCAPIL
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	325.800.000	12	Dokumen	108.600.000	3	25.230.000	-	-	25,00	23,23	DUKCAPIL
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	%	1.573.133.589	87	%	975.690.139	8	170.239.378	27	260.799.347	40,23	44,18	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	Paket	6.000.000	5	Paket	1.887.000	-	-	-	-	-	-	DUKCAPIL
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	Paket	750.000.000	5	Paket	357.161.326	-	-	2	93.995.000	40,00	26,32	DUKCAPIL
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	5	Paket	15.000.000	2	Paket	11.100.000	-	-	1	3.596.400	35,00	32,40	DUKCAPIL
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Laporan	802.133.589	15	Laporan	605.541.813	5	170.239.378	5	163.207.947	66,67	55,07	DUKCAPIL
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	%	3.945.600.000	87	%	1.743.267.753	22	532.441.390	47	388.277.548	79,31	52,82	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	Laporan	150.000.000	6	Laporan	224.372.822	1	4.638.000	5	191.364.158	100,00	87,36	DUKCAPIL

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	75.000.000	12	Laporan	29.495.316	3	6.164.390	3	6.258.390	50,00	42,12	DUKCAPIL
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	3.720.600.000	12	Laporan	1.489.399.615	3	521.639.000	4	190.655.000	58,33	47,82	DUKCAPIL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	%	525.000.000	87	%	182.032.000	6	4.616.000	3	12.444.700	10,34	9,37	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	Unit	450.000.000	17	Unit	157.312.000	2	4.616.000	1	12.444.700	17,65	10,85	DUKCAPIL
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42	Unit	75.000.000	36	Unit	24.720.000	-	-	-	-	-	-	DUKCAPIL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												44,26	37,26	
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	100	%	980.000.000	100	%	407.319.178	-	-	92	343.804.500	92,00	84,41	

Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan dan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100	%	680.000.000	100	%	339.719.178	-	-	83	276.204.500	4,00	101,20	DUKCAPIL
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4	Dokumen	680.000.000	3	Dokumen	339.719.178	-	-	3	276.204.500	100,00	81,30	DUKCAPIL
Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan dan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100	%	300.000.000	100	%	67.600.000			100	67.600.000	100,00	100,00	DUKCAPIL
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	5	Dokumen	300.000.000	1	Dokumen	67.600.000	-	-	1	67.600.000	100,00	100,00	DUKCAPIL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												66,67	60,43	
Predikat Capaian Kinerja												Sedang	Rendah	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil	100	%	45.000.000	100	%	142.185.000	25	4.180.000	25	15.907.415	50,00	14,13	
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan dan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	100	%	45.000.000	100	%	142.185.000	25	4.180.000	25	15.907.415	50,00	14,13	

Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12	Dokumen	45.000.000	2	Dokumen	142.185.000	1	4.180.000	1	15.907.415	50,00	14,13	DUKCAPIL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												50,00	14,13	
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data DKB	100	%	448.750.000	100	%	720.849.480	10	47.730.117	8	27.029.928	18,05	10,37	
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data DKB	100	%	115.000.000	100	%	322.182.730	-	-	-	-	-	-	DUKCAPIL
Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2	Laporan	115.000.000	3	Laporan	322.182.730	-	-	-	-	-	-	DUKCAPIL
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data DKB	100	%	175.000.000	100	%	301.306.750	15	37.939.800	7	21.570.000	22,22	19,75	DUKCAPIL

Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terakhir Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	2	Dokumen	175.000.000	54	Dokumen	301.306.750	8	37.939.800	4	21.570.000	22,22	19,75	DUKCAPIL
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data DKB	100	%	43.750.000	100	%	50.000.000	-	-	-	-	-	-	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5	Dokumen	21.875.000	5	Dokumen	25.000.000	-	-	-	-	-	-	DUKCAPIL
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	Laporan	21.875.000	3	Laporan	25.000.000	-	-	-	-	-	-	DUKCAPIL
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data DKB	100	%	115.000.000	100	%	47.360.000	25	9.790.317	25	5.459.928	75,00	32,20	
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendencygunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan	4	Laporan	115.000.000	2	Laporan	47.360.000	1	9.790.317	1	5.459.928	75,00	32,20	DUKCAPIL

	Pendayagunaan Data Kependudukan													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												37,50	16,10	
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah buku profil perkembangan kependudukan yang tersusun	3	Dokumen	75.000.000	1	Dokumen	40.061.000	-	-	-	17.114.400	50,00	42,72	
Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah buku profil perkembangan kependudukan yang tersusun	3	Dokumen	75.000.000	1	Dokumen	40.061.000	-	-	-	17.114.400	50,00	42,72	
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1	Dokumen	75.000.000	2	Dokumen	40.061.000	-	-	1	17.114.400	50,00	42,72	DUKCAPIL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												50,00	42,72	
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)	49,69	34,13	
Predikat Capaian Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026. Adapun indikator kinerja tertuang pada Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024-2026.

Pembangunan kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan, terutama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari sisi ketertiban administrasi kependudukan, masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara sudah lebih tertib dan baik hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja utama sebagai berikut;

- a. Jumlah kepemilikan dokumen kependudukan Kartu Keluarga ;
- b. Jumlah kepemilikan dokumen kependuduk KTP-el ;
- c. Jumlah Kepemilikan dokumen KIA (Kartu Identitas Anak);
- d. Jumlah Kepemilikan dokumen Akta Kelahiran.

Tabel
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Disdukcapil
Triwulan II Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1) TW. II	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a	Jumlah kepemilikan dokumen kependudukan Kartu Keluarga			18.500	19.000	100%	100%	64.432	92,00 %	100%	100%	
b	Jumlah kepemilikan dokumen kependuduk KTP-el			22.500	24.000	100%	100%	137.186	98,74 %	100%	100%	
c	Jumlah Kepemilikan dokumen KIA (Kartu Identitas Anak)			10.500	10.750	100%	100%	43.668	73,25 %	100%	100%	
d	Jumlah Kepemilikan dokumen Akta Kelahiran			5.623	5.235	100%	100%	141.726	98,77 %	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Salah satu produk berupa dokumen kependudukan seperti : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan memiliki dampak yang sangat luas. Baik aspek hukum, aspek politik, keamanan dan ketertiban, agama, sosial budaya dan lain-lain. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain belum tersebarnya informasi secara merata tentang pentingnya pelaporan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang mengakibatkan terbitnya dokumen kependudukan.

Adapun Tantangan yang harus dihadapi Dinas Dukcapil yaitu :

- a. Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai baik kuantitas maupun kualitas.
- b. Kurang memadainya gedung / sarana prasarana.
- c. Minimnya kemampuan penguasaan teknologi informasi personil pelayanan.
- d. Anggapan bahwa administrasi kependudukan dilihat sebagai sumber pemasukan/pendapatan daerah, bukan sebagai pelayanan publik.
- e. Database kependudukan belum secara optimal dimanfaatkan sebagai bahan penentu perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah.
- f. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan secara cepat, murah, mudah dan nyaman.

Sedangkan peluang-peluang yang mungkin dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan antara lain :

- a. Adanya Undang-undang tentang administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai payung hukum.
- b. Komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil.

- c. Adanya pemegang kepentingan (stake holder) yang mewajibkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil misalnya: lembaga pendidikan, rumah sakit dan perangkat daerah atau lembaga lainnya.
- d. Ketersediaan teknologi dan sarana telekomunikasi yang ada guna mendukung keakuratan, kemutahiran dan validasi data kependudukan

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak terdapat realisasi kinerja yang mengacu pada Standar Nasional / Lainnya.

Dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat disandingkan dengan Standar Nasional / lainnya, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Penunjang Pemerintahan bukan melaksanakan Urusan Wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun Standar Nasional Lainnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung upaya pengembangan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu dirumuskan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dalam jangkaun 1 (satu) tahun ke depan. Adapun Tujuan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan Renja Perangkat Daerah adalah **Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik**. Dimana perangkat daerah memberikan upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sasaran Renja Perangkat Daerah adalah penjabaran dari tujuan yaitu segala sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu tahunan. Adapun sasaran perangkat daerah adalah **Pemantapan Sarana dan Prasarana Pemerintahan dengan dukungan Teknologi Informasi**. Sasaran perangkat daerah akan digambarkan melalui Indikator dan Target yang tercakup dalam program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2024 sedang melaksanakan Program dan kegiatan yang menyentuh masyarakat langsung dengan melakukan INOVASI percepatan

pencapaian pelayanan dengan melaksanakan Jemput Bola. Jenis layanan Jemput Bola “ Paling Asik Duduk Diteras” Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan Terintegrasi terdiri dari :

1. Perubahan Data Kartu Keluarga
2. KTP-el
3. Kartu Identitas Anak (KIA)
4. SKPWNI
5. Akta Kelahiran
6. Akta Kematian
7. Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Selain Pelayanan tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara juga telah melaunching dan melaksanakan pelayanan berbasis online. Jenis Pelayanan Online “Serambi Nusantara”, Aplikasi pelayanan elektronik berbasis Web dengan semua jenis layanan kependudukan.

Selanjutnya Aplikasi Serambi Nusantara ini akan diintegrasikan dengan inovasi “PAK RT IDAMAN”, Percepatan Pelaporan Kematian Penduduk oleh Ketua RT dan Petugas Pemakaman Melalui Layanan Online Dukcapil. Diharapkan dengan adanya program dan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi dalam pemeliharaan database kependudukan yang akurat, mutakhir dan dapat dimanfaatkan oleh Lembaga/instansi lainnya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah disusun untuk memenuhi sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dengan pertimbangan terhadap rencana kinerja dan tercapainya target kinerja dan pendanaan yang dirumuskan dengan tujuan utama.

Adapun program/kegiatan/sub kegiatan yang mengacu pada RPD 2024-2026. Beberapa faktor permasalahan yang di hadapi dan menjadi landasan dalam perumusan dan penetapan program kegiatan dan sasaran / target dalam menetapkan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan;
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan;
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan;
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan;
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. Program Pendaftaran Penduduk

- 1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari Sub Kegiatan;
 - a. Penataan Pendaftaran Penduduk

C. Program Pencatatan Sipil

- 1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari Sub Kegiatan ;
 - a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
- 2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil :
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, terdiri atas Sub Kegiatan ;
 - a. Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan daerah
- 2. Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas Sub Kegiatan;
 - a. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 3. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas Sub Kegiatan;
 - a. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
 - b. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 4. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas Sub Kegiatan;
 - a. Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, terdiri atas Sub Kegiatan;
 - a. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.

Uraian pelaksanaan program kegiatan, penyebaran lokasi program kegiatan serta rumusan program kegiatan dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Penajam Paser Utara
Tahun 2024

Kode	Uraian	Sumber Dana	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah / Berkurang
			Belanja Operasional	Belanja Modal	Belanja Tidak terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasional	Belanja Modal	Belanja Tidak terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
2.12.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
2.12.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	50.000.000				50.000.000	50.000.000				50.000.000	-
2.12.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
2..12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	3.883.822.134	-	-	-	3.883.822.134	4.398.923.323	-	-	-	4.398.923.323	515.101.189
2..12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum –	108.600.000	-	-	-	108.600.000	100.920.000	-	-	-	100.920.000	- 7.680.000

		Dana Bagi Hasil											
2.12.1.2.06	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	1.887.000	-	-	-	1.887.000	1.887.000	-	-	-	1.887.000	-
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	5.017.152	352.144.174	-	-	357.161.326	5.017.152	421.393.324	-	-	426.410.476	69.249.150
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	11.100.000	-	-	-	11.100.000	11.100.000	-	-	-	11.100.000	-
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	605.541.813	-	-	-	605.541.813	828.272.172	-	-	-	828.272.172	222.730.359
2.12.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum –	-	-	-	-	-	51.314.760	-	-	-	51.314.760	51.314.760

		Dana Bagi Hasil											
2.12.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	224.372.822	-	-	-	224.372.822	218.372.822	-	-	-	218.372.822	- 6.000.000
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	29.495.316	-	-	-	29.495.316	32.475.666	-	-	-	32.475.666	2.980.350
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	1.489.399.615	-	-	-	1.489.399.615	1.484.399.615	-	-	-	1.484.399.615	- 5.000.000
2.12.1.2.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah												
2.12.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	157.312.000	-	-	-	157.312.000	163.312.000	-	-	-	163.312.000	6.000.000
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum –	24.720.000	-	-	-	24.720.000	24.720.000	-	-	-	24.720.000	-

		Dana Bagi Hasil											
2.12.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK												
2.12.2.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk												
2.12.2.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	339.719.178	-	-	-	339.719.178	339.719.178	-	-	-	339.719.178	-
2.12.2.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk												
2.12.2.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	67.600.000	-	-	-	67.600.000	67.600.000	-	-	-	67.600.000	-
2.12.3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL												
2.12.3.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil												
2.12.3.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	142.185.000	-	-	-	142.185.000	241.665.000	-	-	-	241.665.000	99.480.000

2.12.3.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil												
2.12.3.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	-	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	50.000.000	50.000.000
2.12.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN												
2.12.4.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan												
2.12.4.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	87.182.730	235.000.000	-	-	322.182.730	322.182.730	-	-	-	322.182.730	-
2.12.4.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan												
2.12.4.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	301.306.750	-	-	-	301.306.750	301.306.750	-	-	-	301.306.750	-
2.12.4.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan												

2.12.4.2.03.04	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	25.000.000	-	-	-	25.000.000	30.720.000	-	-	-	30.720.000	5.720.000
2.12.4.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	25.000.000	-	-	-	25.000.000	28.950.000	-	-	-	28.950.000	3.950.000
2.12.4.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan												
2.12.4.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	47.360.000	-	-	-	47.360.000	47.360.000	-	-	-	47.360.000	-
2.12.5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN												
2.12.5.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan												
2.12.5.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	40.061.000	-	-	-	40.061.000	118.827.000	-	-	-	118.827.000	78.766.000
JUMLAH			7.666.682.510	587.144.174	-	-	8.253.826.684	8.545.547.678	794.890.814	-	-	9.340.438.492	-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintahan dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Output Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Program Tahunan Dinas Dukcapil yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Program. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selain menjadi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024, Renja Perubahan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh Kepala Dinas dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang.

1.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dan menjadi catatan penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya :

1. Dukungan anggaran yang dilimpahkan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah terakomodir dengan adanya Renja Perubahan;
2. Tidak dianggarkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Adminduk oleh Pemerintah Pusat untuk mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Belum adanya kesadaran OPD lingkup Kabupaten untuk melakukan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

1.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah dalam pelaksanaan penyusunan program/ kegiatan/ sub kegiatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kewenangan sebagai OPD.

1.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2024 :

1. Melaksanakan Pelayanan Keliling di Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, Kecamatan Penajam, Disabilitas dan Usia Pemula di sekolah tingkat SLTA dalam pencapaian tingkat perekaman;
2. Melaksanakan Kegiatan Belanja Modal di Perangkat Daerah;
3. Melaksanakan percepatan program Identitas Kependudukan Digital (IKD)
4. Melaksanakan percepatan pelaporan kematian penduduk oleh Ketua RT dan Petugas Pemakaman melalui layanan online Dukcapil "Serambi Nusantara".

Rencana tingkat lanjut yang akan dilaksanakan dalam pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2024 dengan melakukan kegiatan pelayanan dan terus berbenah baik dalam hal pelayanan maupun dalam penyederhanaan prosedur/ birokrasi. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas serta usulan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Penajam Paser Utara menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2024 untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penajam, Juli 2024

Kepala Dinas,



WALUYO, S.Sos

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 196812041989011001